



DAMPAK AKTIFITAS EKONOMI BAWAH TANAH DAN KORUPSI TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN, TINGKAT HARGA, DAN TINGKAT SUKU BUNGA DI INDONESIA (2010.Q1-2019.Q4)

Aloysius Hari Kristianto • Yuliana • Yosua Damas Sadewo

***Abstract .** To effectively decrease, regulate, and halt phenomena that are harmful to national revenue, special and constant attention must be paid to the phenomenon of underground economic activity, particularly in identifying the determination of this economic activity. The purpose of this research is to examine the effects of underground economic operations, the possibility for corruption, the evasion of tax payments, and the impact of economic activity on interest rates and the level of the stock market. The descriptive quantitative technique was utilized in conjunction with statistical test analysis and a classical assumption test to conduct the study. The findings of this study, which examines corruption at the national level, indicate that there is a positive relationship between corrupt behavior and underground economic activities, which are characterized by the money supply in a narrow sense (M1 - currency), and that increasing levels of corruption can lead to an increase in the money supply in a given society. Meanwhile, the greater the quantity of tax revenue collected, the greater the amount of money available for circulation (M1). To achieve this, there is a need to implement collaboration between government departments (good government), such as tax authorities, labor services, police, anti-corruption agencies and cooperatives and MSMEs, among others, and to begin implementing a digitalization system in every financial transaction by integrating it into the e-system of government (e-Government).*

Keywords: *Underground Economy, Narrow Money, Tax on Revenue, Digitalitation, E-Government, Corruption*

©2022 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dipergunakan sebagai acuan untuk mengukur perkembangan ekonomi dengan variabel yang digunakan adalah pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional yang benar dan menyeluruh dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Perhitungan ini terkait dengan penentuan sektor mana saja yang dapat berkontribusi secara langsung terhadap

Aloysius Hari Kristianto (✉)

Institut Shanti Bhuana

Email : harialoysius@gmail.com,

Yuliana

Institut Shanti Bhuana

Email : yuliana@shantibhuana.ac.id,

Yosua Damas Sadewo

Institut Shanti Bhuana

Email : yosua.damas@shantibhuana.ac.id

kesejahteraan masyarakat dan sektor mana yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk mendukung sektor-sektor yang saling terkait. Aktifitas ekonomi bawah tanah merupakan salah satu sektor yang selama ini telah luput dari perhitungan pendapatan nasional. Kegiatan ekonomi bawah tanah lebih menonjol terjadi di negara berkembang dan perlu mendapat perhatian secara khusus dan sangat merugikan negara (Schneider & Hametner, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Feige's (1990), ekonomi bawah tanah dapat dikategorikan sebagai : (1) *The Illegal Economy* merupakan aktifitas ekonomi yang melanggar perundangan dan hukum seperti perdagangan barang curian, pembajakan, penyelundupan, perjudian, prostitusi dan transaksi narkoba. (2) *The Unreported Economy* adalah aktifitas ekonomi yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. (3) *The Unrecorded Economy* adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dan tanpa disimpan di rekening bank nasional/lokal (Azwar & Mulyawan, 2017). Untuk menentukan besaran variabel ekonomi bawah tanah bukanlah sesuatu yang mudah dengan tingkat akurasi perhitungan yang tinggi. Diperlukan kebijakan fiskal dari pemerintah yang berpihak dan menguntungkan bagi pelaku ekonomi tersebut, hal ini bertujuan untuk mengarahkan pelaku ekonomi bawah tanah dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah/nasional dengan memberikan kemudahan dalam regulasi dan akses kredit usaha yang bekerja sama dengan Lembaga keuangan mikro/koperasi/Bank Perkreditan Rakyat. Kemudahan tersebut dapat diperoleh dengan program subsidi pajak penghasilan dan pinjaman bunga kredit yang rendah untuk pengembangan usaha pada sektor ultra mikro, mikro dan kecil (Asaminew, 2010).

Aktifitas ekonomi bawah tanah merupakan aktifitas yang menghasilkan pendapatan tanpa sepengetahuan otoritas pajak, hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Untuk kalangan tertentu aktifitas ekonomi bawah tanah dikenal sebagai pasar paralel yang meliputi sektor informal dan pasar gelap (Kristianto, Widya, et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristianto, et al (2021) terdapat dua indikator yang dapat mengidentifikasi aktifitas ekonomi bawah tanah yaitu jumlah uang beredar dalam arti sempit yaitu uang kartal (M1) yaitu dalam bentuk tunai, pemungutan secara illegal tanpa adanya kejelasan dalam bentuk kwitansi dan nota serta jumlah pajak yang terunggul secara tunai tanpa dilakukan integrasi sistem perbankan. Transaksi yang dilakukan secara tunai ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan jumlah uang beredar dalam masyarakat yang dapat dibelanjakan secara langsung.

Peningkatan jumlah kejadian korupsi di Indonesia yang tercermin dari jumlah pajak yang dipungut setiap tahun dan peningkatan jumlah pendapatan masyarakat merupakan gambaran dari pertumbuhan jumlah uang beredar (M1) yang merupakan jumlah secara keseluruhan uang kartal yang dimiliki masyarakat yang dipegang secara tunai. Adanya hubungan yang searah ketika jumlah uang beredar yang dimiliki masyarakat semakin besar yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi maka semakin tinggi aktifitas ekonomi bawah tanah yang terjadi (Kristianto, Nadapdap, et al., 2021). Untuk memitigasi aktifitas tersebut perlu diterapkan sistem digitalisasi (*E-Government*) yang terintegrasi antar departemen dari otoritas pemerintahan yang terkait dalam transaksi pembayaran seperti retribusi, pembayaran pajak, transaksi bisnis. Hal ini dilakukan untuk proses transparansi dalam peningkatan akses masyarakat ke pemerintah. Akses ke pemerintah akan menjadi lebih terbuka sebagai akibat dari sistem *E-Government*, yang akan diawasi oleh organisasi tertentu untuk menilai kinerja pemerintah atas dasar integritas dan akuntabilitas. Diharapkan dengan terjalannya kerjasama aparat penegak hukum yang jujur dan mendukung kepentingan masyarakat, suap, korupsi, dan pemungutan liar sedikit banyak dapat dikurangi.

Diperlukan kebijakan untuk mengendalikan aktifitas ekonomi bawah tanah, agar aktifitas ekonomi tersebut dapat dikurangi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Masih tingginya aktifitas ekonomi tersebut disebabkan karena peraturan



pemerintah yang terlalu berbelit-belit dan pembatasan pengenalan barang baru ke pasar, pembentukan pasar paralel telah terjadi. Memproduksi dan mendistribusikan barang-barang di sektor informal adalah melanggar hukum dan melanggar undang-undang negara ketika menyangkut pasar sektor informal. Namun, jika kita berbicara tentang pasar gelap, proses produksi dan distribusi barang adalah legal dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan negara bagian mana pun. Perusahaan informal termasuk unit usaha kecil, pekerja mandiri, perusahaan tidak terdaftar, bisnis dengan akses terbatas ke layanan keuangan, bisnis di daerah perbatasan dan pinggiran kota, dan bisnis yang terletak di daerah perbatasan dan pinggiran kota, untuk menyebutkan beberapa karakteristik. (Faal, 2003). Menurut Lofchie (1989), sebagaimana dikutip dalam Wardiyanto (2009), kebijakan dalam pengelolaan perpajakan seringkali gagal (*failure to implement Successfully*), permasalahan yang sering muncul adalah karena kurangnya kompetensi para ahli, birokrat, dan pejabat sipil di bidang perpajakan. , serta munculnya ketidakdisiplinan pelaku usaha, ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, konflik antara pegawai pemerintah dengan kelompok masyarakat dominan, dan kurangnya koordinasi antar administrasi perpajakan (Pravasanti, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristianto, Nadapdap, et al., (2021) menyatakan bahwa terdapat dua variabel yang mengidentifikasi memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi bawah tanah. Yang pertama adalah terbatasnya jumlah uang beredar (M1), yang kedua adalah jumlah individu yang berpotensi korupsi di dalam lembaga, dan yang ketiga adalah jumlah pajak penghasilan yang dipungut. Karena kebutuhan untuk membiayai defisit yang disebabkan oleh tindakan terkait korupsi yang dilakukan di dalam badan hukum, peningkatan jumlah tindakan terkait korupsi yang dilakukan di dalamnya dapat mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar (M1) sebagai akibat dari peningkatan dalam jumlah tindakan terkait korupsi yang dilakukan di dalam lembaga. Selain itu, peningkatan jumlah pajak penghasilan yang dipungut juga dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah uang yang tersedia untuk dibelanjakan oleh konsumen (M1).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Blanchard (2006) bahwa, menaikkan tarif pajak diprediksi akan meningkatkan jumlah penerimaan negara; namun demikian, hal itu dapat mengakibatkan kemungkinan penyimpangan pajak, yang dapat menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kenaikan tarif pajak berpotensi mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba. Menanggapi peraturan pemerintah yang terlalu ketat dan pembatasan pengenalan barang baru ke pasar, pembentukan pasar paralel dapat terjadi dengan mudahnya. Memproduksi dan mendistribusikan barang-barang di sektor informal adalah melanggar hukum dan melanggar perundangan negara dalam hal pasar sektor informal. Namun, jika kita berbicara tentang pasar gelap, proses produksi dan distribusi barang adalah sah dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan negara bagian mana pun. Perusahaan informal meliputi unit usaha kecil, pekerja mandiri, usaha tidak terdaftar, bisnis dengan akses terbatas ke layanan keuangan, bisnis di daerah perbatasan dan pinggiran kota dengan beberapa karakteristik yang berbeda (Azwar & Mulyawan, 2017). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi bawah tanah, masalah dapat muncul berupa rencana desentralisasi fiskal yang tidak efektif dan keuntungan yang rendah sebagai konsekuensi dari kurangnya kesadaran tentang perlunya membayar pajak, terutama dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah per kabupaten (Kanao et al., 2010).

Stigma masyarakat umum terhadap pelaku ekonomi bawah tanah memberikan kesan kumuh, jorok, tidak tertib, lokasi yang ditempati sebagai sarana perdagangan yang kurang teratur dan tertata rapi dan, seringkali menempati ruang publik yang mengganggu kepentingan publik. Di setiap daerah khususnya di Indonesia gambaran tersebut memberikan kesan tidak terlalu menjadi prioritas pemerintah daerah terutama para pedagang kaki lima. Pertumbuhan



aktifitas ekonomi bawah tanah meningkat karena keterbatasan kesempatan kerja untuk Angkatan kerja produktif yang memiliki tingkat Pendidikan yang rendah, yang menjadi alternatif pilihan bagi pelaku ekonomi bawah tanah yang murni peduli dengan kehidupan (Tanzi & Fund, 2014). Ekonomi bawah tanah berbeda dari sektor ekonomi lainnya karena ukuran kegiatannya yang kecil, ketergantungan pada sumber daya lokal, fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat, dan aksesibilitas yang relatif mudah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Herlina wa ode, 2015). Adanya beban pajak yang dianggap memberatkan pelaku ekonomi, birokrasi yang rumit dan pembatasan yang diberlakukan, serta perilaku suap yang dapat menjurus pada tindakan korupsi, semuanya berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi bawah tanah (Tan et al., 2016). Adanya korelasi positif antara korupsi dan aktivitas pelaku ekonomi bawah tanah, jika jumlah uang beredar secara tunai meningkat maka potensi perilaku tindak korupsi juga akan bertumbuh. Peredaran uang, yang tidak dapat dinilai dengan perhitungan PDB, dapat merusak pendapatan negara dan daerah ketika jumlah uang beredar dianggap dalam arti terbatas (seperti dalam mata uang). Tantangan-tantangan ini harus diperhitungkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagai konsekuensi dari beban regulasi yang berat, para pelaku ekonomi bawah tanah mencari jalan yang berbeda dalam segala situasi dan mencari perlindungan agar dapat terus menjalankan usaha mereka (Ouédraogo, 2017).

Aktivitas pelaku ekonomi yang terlibat dalam perekonomian bawah tanah Indonesia belum sepenuhnya diidentifikasi dan dikarakterisasi, penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas individu yang terlibat dalam perekonomian bawah tanah di Indonesia. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan secara kolaboratif untuk memastikan bahwa tindakan pelaku ekonomi yang terlibat dalam ekonomi bawah tanah Indonesia terkait dengan situasi pelaku ekonomi bawah tanah Indonesia di setiap wilayah negara. Ekonom Indonesia telah membuat banyak pemikiran dan prakiraan ekonomi untuk membatasi risiko yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk secara aktif berkontribusi pada proses pembangunan negara atau wilayah. Hasil estimasi diperoleh dengan menggunakan indeks pertumbuhan konsumsi yang lebih cepat dari indeks pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sebagaimana ditentukan dengan metode estimasi ini, 40% dari total produk yang dihasilkan oleh PDB diperkirakan disebabkan oleh kurangnya aktivitas ekonomi, korupsi, atau aktivitas ilegal lainnya (Nizar, 2015).

Dengan menggunakan data moneter, Faal (2003) menemukan bahwa ekonomi bawah tanah Gaiana mengalami gelombang perubahan besar antara tahun 1964 dan 2000, dan mata uang meningkat secara signifikan dengan meningkatkan jumlah variabel yang signifikan secara statistik, yang menyatakan bahwa hal itu mungkin telah menyebabkan penurunan yang signifikan. Perekonomian bawah tanah Guyana diperkirakan mencapai 54,06% dari PDB negara selama periode peninjauan, dengan perkiraan tarif pajak rata-rata 19,58% dari PDB negara untuk periode yang sama. Ketika aktivitas ekonomi bawah tanah meningkat, tingkat pajak potensial pada produk domestik bruto (PDB) negara akan menurun. M1 (*Narrow Money*) adalah salah satu variasi mata uang yang digunakan dalam ekonomi bawah tanah yang dibuat dengan mengubah mata uang standar yang digunakan dalam ekonomi bawah tanah di Tanzania. M1 (*Narrow Money*) adalah jenis mata uang yang digunakan dalam ekonomi bawah tanah sebagai transaksi tunai (Samuda, 2016). Sederhananya, kenaikan suku bunga uang berdampak negatif pada jumlah yang dapat dipinjam. Dengan kata lain, dengan meningkatnya suku bunga *funding*, masyarakat umum lebih cenderung menanamkan modal kepada lembaga keuangan dalam bentuk deposito. Lain halnya jika rata-rata orang lebih tertarik membelanjakan uangnya untuk bisnis daripada menyimpannya di rekening tabungan. Secara umum diyakini bahwa menjalankan bisnis dengan uang akan



meningkatkan nilai uang, bahkan jika itu kurang dari yang diyakini orang kebanyakan (Furuoka & Munir, 2014).

Dengan mengkaji dampak aktivitas pelaku ekonomi bawah tanah dan kemungkinan perilaku korupsi menggunakan pendekatan moneter dan sosial, tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami pengaruh perilaku pelaku ekonomi bawah tanah. Variabel bebas yang dipergunakan adalah tingkat suku bunga, tingkat harga, penerimaan pajak dan tingkat korupsi. Variabel terikat adalah jumlah uang beredar (*M1-narrow money*), yang direpresentasikan dalam grafik sebagai persamaan. Dengan menggunakan uji statistik (uji t, uji F, koefisien determinasi, dll), penelitian ini menggunakan prosedur deskriptif kuantitatif. Selanjutnya dilanjutkan ke uji asumsi klasik, yang terdiri dari empat uji yaitu uji normalitas, uji dispersibilitas heterogen, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Survei ini menggunakan berbagai negara dan periodenya dari 2010.Q1 - 2019.Q4

LANDASAN TEORI

Ekonomi bawah tanah yang berkembang di suatu negara dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kehilangan pendapatan pemerintah/pajak. Salah satu penjelasan untuk ini adalah bahwa otoritas pajak tidak memiliki kontrol yang memadai. Selain aktivitas ekonomi yang tinggi, salah satu penyebabnya adalah besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Tanzi & Fund, 2014). Ada korelasi positif antara volatilitas harga dan ekonomi bawah tanah. Semakin besar perekonomian informal, semakin besar kemungkinan harga akan naik. Independensi Bank Indonesia dalam memutuskan kebijakan moneter yang akan dilaksanakan sangat penting dalam membangun kemitraan ini (Mazhar & Méon, 2017). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Williams & Horodnic (2017) menunjukkan bahwa, kompleksitas birokrasi, pembayaran pajak yang tinggi, dan korupsi pegawai negeri yang meluas adalah semua segmen kegiatan ekonomi yang terjadi antara kegiatan ekonomi formal dan ilegal. Birokrasi yang kompleks, pembayaran pajak yang besar, dan korupsi yang merajalela di kalangan pegawai sektor publik semuanya berkontribusi pada transformasi ini. Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kiani et al (2015) dengan metode campuran di Pakistan, Pasokan uang didorong oleh ekonomi bawah tanah, menekankan fakta bahwa faktor moneter seperti bunga deposito memiliki dampak negatif jangka panjang pada jumlah uang beredar. Hasil kesimpulan adalah pada tahun 1975 hingga 2010, tingkat harga mata uang berdampak positif pada permintaan uang dan jumlah uang beredar, sementara tingkat harga mata uang berdampak negatif. Berikut ini, peneliti akan membuat hipotesis penelitian yang berdasarkan pada hasil penelitian empiris sebelumnya yaitu :

Tingkat harga dan ekonomi bawah tanah

Menurut hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Amoh & Adafula (2019) menyatakan bahwa, fluktuasi harga yang besar telah mengakibatkan meningkatnya aktivitas ekonomi bawah tanah, serta melemahnya kemampuan institusi pemerintah untuk memerangi aktivitas ekonomi gelap. Secara khusus, penelitian yang dilakukan oleh Samuda (2016), tingkat harga memiliki dampak yang menguntungkan terhadap permintaan uang oleh pelaku ekonomi bawah tanah secara tunai. Fluktuasi harga ini terkait dengan perubahan harga produk, yang mempengaruhi daya beli masyarakat

H1 : Tingkat harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktifitas ekonomi bawah tanah

Tingkat penerimaan pajak dan ekonomi bawah tanah

Sesuai dengan temuan hasil penelitian oleh Melnick & Sokoler (1984), kenaikan pajak dapat mendorong kebijakan untuk meningkatkan jumlah uang beredar, hal ini bertujuan untuk



mengurangi produksi dan menaikkan harga, dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang dapat didistribusikan pemerintah kepada masyarakat. dalam bentuk kredit. Berdasarkan temuan penelitian empiris yang dilakukan oleh Nurunnabi (2019), negara menyadari pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai pajak kepada masyarakat, dengan minimnya pengetahuan tentang pajak di kalangan masyarakat umum, kontribusi masyarakat terutama pelaku ekonomi untuk pembangunan akan terbatas. Hal ini juga bertujuan untuk menekan aktifitas pelaku usaha yang terlibat dalam ekonomi bawah tanah.

H2 : Tingkat penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktifitas ekonomi bawah tanah

Tingkat suku bunga dan ekonomi bawah tanah

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Samuda tahun 2016, disimpulkan bahwa suku bunga deposito, yang mewakili biaya peluang memegang uang, berdampak negatif pada kegiatan ekonomi bawah tanah. Diyakini bahwa ketika suku bunga deposito naik, orang lebih cenderung menyimpan uang mereka di deposito. Penelitian yang dilakukan oleh Afdi & Purnomo (2015) menyatakan bahwa, penurunan permintaan uang tunai di masyarakat adalah akibat dari semakin tersedianya sistem keuangan Indonesia: akses ATM, *mobile banking*, *online banking* dan layanan perbankan lainnya.

H3 : Tingkat suku bunga simpanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aktifitas ekonomi bawah tanah.

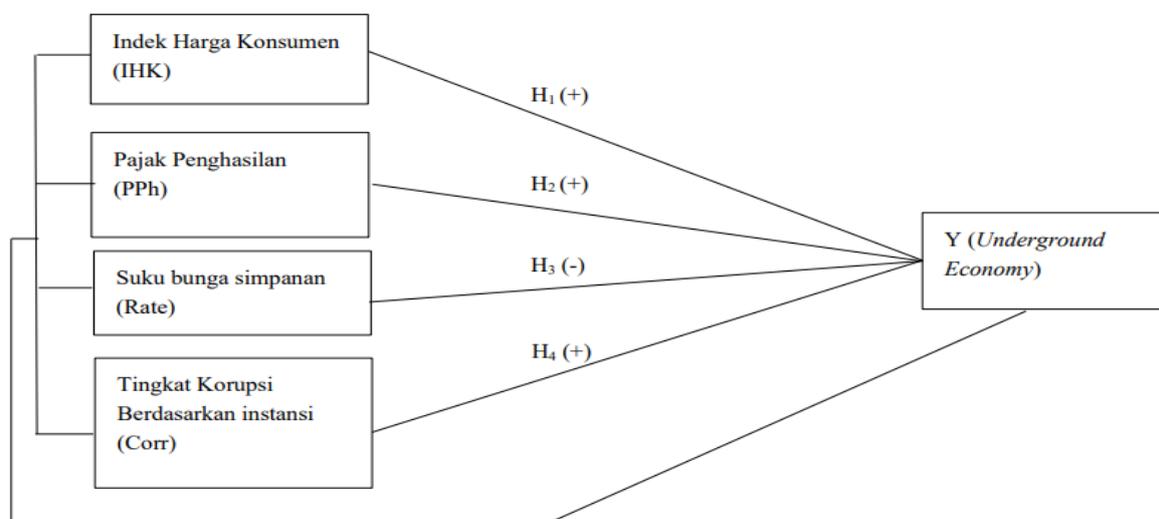
Korupsi dalam tingkat instansi dan ekonomi bawah tanah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmani & Yousefi (2010), secara makro ekonomi baik untuk negara berkembang dan negara maju, tingkat korupsi yang tinggi memiliki potensi peningkatan jumlah uang beredar masyarakat yang dapat merugikan pendapatan nasional. Hasil studi yang dilakukan oleh Ozsahin & Ucler (2017) tingginya potensi peningkatan angka korupsi dengan hukum yang tidak tegas dan lemah dapat menciptakan inflasi, hal ini bisa secara sengaja dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar di masyarakat untuk mencari keuntungan dari oknum pejabat.

H4 : Tingkat korupsi berdasarkan instansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktifitas ekonomi bawah tanah.

Ilustrasi di bawah ini menjelaskan kerangka konseptual penelitian:

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



METODOLOGI

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Metode ini dipergunakan untuk pengukuran yang bersifat komparatif, deskriptif dan asosiatif (Creswell, 2014). Metode kuantitatif dibentuk dengan model persamaan untuk mengukur dan menyusun hipotesis, dihitung secara statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda metode OLS (*Ordinary Least Square*), jenis data yang dipergunakan adalah *time series* dengan hasil estimasi yang mempunyai sifat *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimator*) yang bertujuan untuk mendekati garis regresi terhadap data actual (Basuki, 2017). Berikut ini adalah bentuk persamaan dan fungsi yang menginterpretasikan kerangka konseptual penelitian dengan hasil estimasi yang bersifat BLUE sebagai berikut:

$$M1_i = f (IHK, PPh, Rate, Corr). Cp \dots\dots\dots 1$$

Bentuk estimasi *Best Linear Unbias Estimator* (*BLUE*) berdasarkan asumsi dengan bentuk nilai yang diharapkan adalah:

$$E(M1_i \text{ IHK, PPh, Rate, Corr}) = \beta_0 + \beta_1IHK_i + \beta_2PPh_i - \beta_3Rate_i + \beta_4Corr_i + \varepsilon_i \dots\dots\dots 2$$

Bentuk model persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$M1_i = \beta_0 + \beta_1IHK_i + \beta_2PPh_i - \beta_3Rate_i + \beta_4Corr_i + \varepsilon_i \dots\dots\dots 3$$

Model Residual dapat direpresentasikan dalam bentuk persamaan aljabar berikut :

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= M1_i - M1^{\wedge}_i \\ \varepsilon_i &= M1_i - \beta_1IHK_i - \beta_2PPh_i + \beta_3Rate_i - \beta_4Corr_i \dots\dots\dots 4 \end{aligned}$$

Berdasarkan pendekatan moneter pada persamaan (3) menjelaskan bahwa tingkat harga diwakili oleh variabel Indeks Harga Konsumen (IHK), tingkat suku bunga diwakili dengan tingkat suku bunga simpanan deposito, variabel pajak diwakili oleh pajak penghasilan berpengaruh terhadap permintaan uang M1 (*narrow money*) yang dipegang masyarakat yang mewakili aktifitas ekonomi bawah tanah sedangkan variabel tingkat korupsi diwakili oleh tingkat korupsi berdasarkan instansi. Dimana kenaikan tingkat potensi korupsi meningkatkan aktifitas ekonomi bawah tanah.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Keterangan
M1	Permintaan uang riil (M1) yaitu uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dipergunakan sebagai sarana transaksi secara tunai yang mewakili aktifitas ekonomi bawah tanah
IHK	Indeks Harga Konsumen yaitu pertumbuhan tingkat harga yang terjadi di masyarakat sebagai aspek kemampuan daya beli dengan anggapan mempunyai pengaruh searah terhadap permintaan uang M1.



PPh	Pajak penghasilan sebagai penentu penerimaan negara dengan anggapan mempunyai pengaruh searah terhadap permintaan uang M1
Rate	Tingkat suku bunga yang diwakili oleh suku bunga deposito 1 bulanan yaitu untuk menunjukkan perilaku masyarakat menyimpan dana untuk mendapatkan keuntungan dari tingkat suku bunga yang berlaku dengan asumsi bahwa berpengaruh negative terhadap permintaan uang M1.
Corr	Tingkat korupsi diwakili oleh tingkat korupsi berdasarkan instansi bersifat politis dan birokratis yang dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi, dengan mendistorsi beberapa harga investasi public sebagai pembayaran suap kepada oknum tertentu, dengan asumsi berpengaruh positif terhadap aktifitas ekonomi bawah tanah.

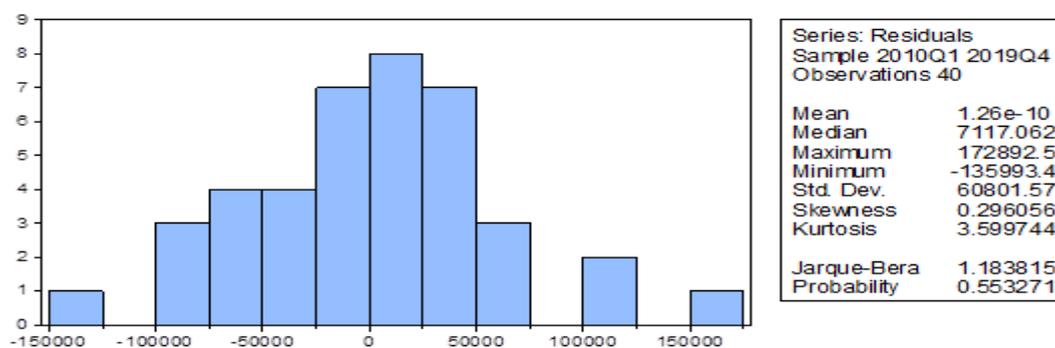
HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode kuantitatif dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel Jumlah uang Beredar (JUB-M1) terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK), Pajak Penghasilan (PPh), Tingkat suku bunga deposito (*Rate*) dan tingkat korupsi (Corr) dengan alat analisis menggunakan Eviews 8 untuk melakukan analisis *Ordinary Least Square (OLS)*.

Pengujian awal dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari empat pengujian yaitu uji asumsi normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Tujuan pengujian asumsi klasik sebagai pembuktian bahwa model yang dibangun bersifat *BLUE (Best Linier Unbiased Estimator)* dan akurat.

Uji asumsi klasik tahap pertama adalah uji normalitas, uji ini bertujuan menentukan distribusi data yang hendak dikaji. Uji ini dilihat dengan menggunakan *Jarquee Berra* yang ditunjukkan pada gambar 2. Hasil pengujian menunjukkan dengan nilai probabilitas *Jarquee Berra* sebesar 0,553271 ($>$ *critical value 5%*) sehingga dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

Gambar 2. Uji Asumsi Normalitas



Sumber : Eviews 8 (data diolah)

Uji asumsi heteroskedastisitas dalam model regresi bertujuan untuk mengetahui apakah varian residual bersifat tidak sama (heterogen) dalam semua pengamatan di penelitian yang dilakukan. Uji heteroskedastisitas dalam



pengujiannya menggunakan *Glejser test* yang dapat dilihat pada table 2 (dua). Hasil dari uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0.3209 ($>$ *critical value* 5%), dengan ini maka dinyatakan bahwa varian residual dari semua pengamatan yang dilakukan dalam model regresi bersifat homogen.

Tabel 2. Uji Asumsi Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.161371	Prob. F(4,35)	0.3445
Obs*R-squared	4.687025	Prob. Chi-Square(4)	0.3209
Scaled explained SS	4.545054	Prob. Chi-Square(4)	0.3372

Keterangan: signifikansi 5%.

Uji asumsi multikolinieritas dalam model regresi pengamatan bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas yang dipergunakan. Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang ditunjukkan pada table 3 (tiga). Nilai VIF yang ditunjukkan dalam pengamatan adalah dari suku bunga simpanan deposito sebesar 1.610334, IHK sebesar 2.200178, tingkat korupsi berdasarkan instansi sebesar 3.261550, and pajak penghasilan sebesar 3.144188. Keempat nilai VIF ayng ditunjukkan dalam analisa tersebut bernilai kurang dari ($<$)10, hal ini menjelaskan bahwa tidak adanya korelasi yang kuat dari setiap variabel bebas yang digunakan dalam model regresi.

Tabel 3. Uji Asumsi Multikolinieritas
Variance Inflation Factors
Date: 07/05/20 Time: 07:12
Sample: 2010Q1 2019Q4
Included observations: 40

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	8.45E+09	82.09533	NA
IR	3.46E+09	101.4546	1.610334
IHK	5.04E+08	17.73845	2.200178
CORR	2341638.	13.67468	3.261550
PPH	0.272927	58.66736	3.144188

Keterangan : signifikansi 5%

Pengujian asumsi autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi variabel dalam model regresi dengan adanya perubahan waktu. Uji autokorelasi yang dipergunakan adalah dengan *Durbin Watson test*, jika nilai berada antara nilai -2 dan +2, maka dapat dikatakan tidak terdapat adanya gejala autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Durbin Watson Stat* adalah sebesar 1.549612, nilai tersebut berada di -2 dan +2 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara variabel dalam model regresi dengan perubahan waktu atau tidak terdapat adanya gejala autokorelasi.



Secara komprehensif hasil uji asumsi klasik menjelaskan bahwa model regresi yang dipergunakan telah memenuhi setiap pengujian dalam asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi. Oleh sebab itu model regresi dalam pengamatan dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis yang sudah dibangun dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil pengujian hipotesis yang dibangun dalam pengamatan dapat dilihat melalui table 4 (empat) berikut.

Tabel 4. Hasil Ordinary Least Square

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73398.49	91948.00	-0.798261	0.4301
RATE	-89061.47	58851.76	-1.513319	0.1392
IHK	12320.62	22451.10	0.548776	0.5866
CORR	3832.358	1530.241	2.504415	0.0171
PPH	7.734766	0.522424	14.80554	0.0000
R-squared	0.961859	Mean dependent var		996665.9
Adjusted R-squared	0.957500	S.D. dependent var		311329.6
S.E. of regression	64181.97	Akaike info criterion		25.09330
Sum squared resid	1.44E+11	Schwarz criterion		25.30441
Log likelihood	-496.8660	Hannan-Quinn criter.		25.16963
F-statistic	220.6638	Durbin-Watson stat		1.549612
Prob(F-statistic)	0.000000			

Keterangan: signifikansi 5%.

Hasil analisis dengan *Ordinary Least Square (OLS)* menyatakan bahwa tingkat suku bunga simpanan tidak dapat dibuktikan berpengaruh ($prob = 0,1392 > critical\ value\ 5\%$) terhadap jumlah uang beredar dalam arti sempit (*narrow money-M1*). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar di masyarakat (M1) tidak dapat dibuktikan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga simpanan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa indeks harga konsumen tidak dapat dibuktikan berpengaruh ($prob = 0,5866 > critical\ value\ 5\%$) pada jumlah uang yang beredar di masyarakat (M1).

Hasil analisis dengan menggunakan OLS pada tabel 4 (empat) menunjukkan bahwa tingkat korupsi memiliki pengaruh yang searah ($coefficient = 3832,358$) dengan tingkat signifikansi ($0,0171 < critical\ value\ 5\%$) terhadap jumlah uang beredar (M1). M1 yang ditunjukkan adalah jumlah uang kartal (logam dan kertas) dan uang giral (surat berharga bermata uang Rupiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus korupsi yang terjadi di instansi dapat mempengaruhi peningkatan jumlah uang beredar (M1). Sebaliknya, jika terdapat penurunan jumlah kasus korupsi maka dapat mempengaruhi penurunan jumlah uang beredar (M1).

Hasil tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmani & Yousefi (2010), bahwa tingkat korupsi merupakan salah satu variabel yang paling signifikan mempengaruhi pertumbuhan jumlah uang beredar. Negara-negara dengan pengendalian yang lebih baik atas kasus korupsi dapat mengambil keuntungan dari inflasi yang lebih rendah karena berbagai alasan, salah satunya adalah peningkatan efisiensi dalam kebijakan moneter suatu negara dan peningkatan pendapatan negara, yang mengurangi kebutuhan bank sentral untuk melakukan kebijakan untuk meningkatkan *money supply* (Samimi & Abedini, 2012).



Negara dengan tingkat korupsi yang rendah memiliki tingkat jumlah uang beredar yang rendah, sedangkan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki tingkat jumlah uang beredar yang tinggi. Defisit belanja dan anggaran pemerintah dapat meningkat sebagai respons atas banyaknya kasus korupsi yang terjadi di suatu negara, yang mengakibatkan peningkatan belanja pemerintah dan defisit anggaran. Dalam keadaan demikian, bank sentral suatu negara akan mengambil kebijakan dengan mencetak uang untuk mendanai defisit anggaran yang terjadi sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar. Dikatakan juga bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar dapat meningkatkan kemungkinan inflasi yang lebih besar di negara yang bersangkutan (Rahmani & Yousefi, 2010).

Semakin tingginya tingkat korupsi yang terjadi dapat meningkatkan inflasi salah satu yang dapat menyebabkan hal ini karena sistem pajak yang berlaku dalam pemerintahan dan negara tidak efisien sehingga tidak dapat melakukan kompensasi atas pendapatan yang hilang dan kemudian lebih memilih kebijakan *seigniorage*, yaitu mencari keuntungan dengan meningkatkan pertumbuhan jumlah uang untuk mencetak uang baru dalam periode tertentu hal ini bertujuan untuk meningkatkan inflasi (Ozsahin & Ucler, 2017).

Hasil temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa besaran jumlah pajak penghasilan yang dipungut secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap M1 (*coefficient* = 7.734766) dengan tingkat signifikan ($0,0000 < \textit{critical value}$ 5%). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipungut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar yang dimiliki masyarakat umum. Namun, pengurangan jumlah pajak penghasilan yang dipungut secara tunai dapat mengakibatkan pengurangan jumlah uang beredar yang dimiliki oleh masyarakat umum.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yakubu et al, (2014) mengenai hubungan *money supply* dengan penerimaan pajak menyatakan bahwa hubungan pendapatan pemerintah dengan penawaran uang di Nigeria menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan pemerintah salah satunya disebabkan karena semakin besarnya jumlah pajak penghasilan yang dipungut secara tunai oleh pemerintah Nigeria.

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Contc et al. (1984) yang menyatakan bahwa perubahan tingkat pajak mampu mendorong kebijakan untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat hal ini bertujuan untuk mengurangi *output* dan menaikkan harga. Studi dari Melnick & Sokoler (1984) menjelaskan bahwa pemerintah akan selalu berusaha untuk mempertahankan pendapatan nasional/daerah, termasuk pendapatan yang diperoleh dari pajak melalui kebijakan yang dilakukan bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar melalui kemudahan dalam pengajuan kredit dengan melakukan penurunan suku bunga *lending facility*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan atau simultan terdapat pengaruh secara signifikan dari tingkat suku bunga simpanan (RATE), Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Korupsi berdasarkan Instansi (Corr), dan besarnya jumlah pajak penghasilan (PPH) terhadap Jumlah Uang Beredar (M1). Hasil ini menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan yang terjadi pada tingkat suku bunga simpanan, Indeks Harga Konsumen, Tingkat korupsi berdasarkan instansi dan besaran jumlah pajak penghasilan secara bersamaan dalam kurun waktu yang sama mampu memberikan pengaruh terhadap Jumlah Uang Beredar (*M1-Narrow money*) yang dipegang masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengidentifikasi tiga variabel yang mempengaruhi kegiatan ekonomi bawah tanah. Yang pertama adalah terbatasnya jumlah uang beredar (*M1-narrow money*) yang dilakukan secara tunai, yang kedua adalah jumlah individu yang berpotensi korupsi di



fasilitas tersebut, dan yang ketiga adalah besaran jumlah pajak penghasilan yang dipungut secara tunai. Peningkatan jumlah uang beredar (M1) merupakan akibat dari peningkatan jumlah tindak korupsi yang terjadi dalam sebuah instansi sebagai konsekuensi untuk membiayai defisit sebagai dampak dari tindak korupsi yang terjadi. Selain itu, peningkatan pada jumlah pajak penghasilan yang dipungut secara tunai juga dapat meningkatkan jumlah uang beredar (M1) yang berpotensi terhadap pemungutan liar.

Di Indonesia, tingkat simpanan umum dan simpanan mata uang rupiah mengalami peningkatan hal ini disebabkan beberapa diantaranya karena peningkatan kasus korupsi level instansi pemerintahan dan meningkatnya jumlah pemungutan pajak tahunan secara tunai. Peningkatan jumlah uang yang dimiliki masyarakat menunjukkan bahwa jumlah uang yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi baik di aktifitas ekonomi formal maupun aktifitas ekonomi bawah tanah meningkat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dan akses masyarakat kepada pemerintah, perlu diterapkan sistem digitalisasi yang terintegrasi antar berbagai pemangku kepentingan dengan sistem *open access* seperti kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan pembayaran seperti retribusi, pajak, perdagangan dan implementasi *E-government*. Hal ini akan memberikan kemudahan masyarakat akses ke pemerintahan dengan catatan bahwa masyarakat diberikan sosialisasi, pemahaman dan pendampingan terkait implementasi program tersebut. Pemerintah dipantau oleh organisasi tertentu yang mengevaluasi kinerja pemerintah berdasarkan kejujuran dan akuntabilitas. Bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang jujur dan mendukung kepentingan masyarakat yang dirancang untuk mengurangi suap, korupsi dan pemungutan liar yang masih terjadi di masyarakat kecil. Kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan data tentang aktivitas ekonomi bawah tanah dan mengembangkan program untuk mendorong para pelaku ekonomi bawah tanah bertindak secara legal dan terlibat dalam aktivitas ekonomi formal bertujuan untuk memerangi kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pemerintah hendaknya juga memberikan kemudahan dalam fasilitas pinjaman usaha ultra mikro, mikro dan kecil, juga kemudahan fasilitas jaminan sosial kepada pekerja di segmen mikro dan kecil. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, yang membantu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah/negara. Bekerja sama dengan akademisi dan lembaga swasta resmi untuk melakukan program kemasyarakatan dalam pelatihan berkelanjutan tentang literasi digital berupa sosialisasi dan pendampingan, hal ini sangat bermanfaat untuk membantu mereka mempelajari informasi penting yang akan membantu memajukan pembangunan daerah/negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdi, M., & Purnomo, K. (2015). underground economy activities in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, 65608. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65608/1/MPRA_paper_65608.pdf
- Amoh, J. K., & Adafula, B. (2019). An estimation of the underground economy and tax evasion: Empirical analysis from an emerging economy. *Journal of Money Laundering Control*, 22(4), 626–645. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2019-0002>
- Asaminew, E. (2010). The Underground Economy and Tax Evasion in Ethiopia: Implications for Tax Policy. *Macroeconomic Division Ethiopian Economic Policy Research Institute*, 1–26. <http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2011-edia/papers/130-asaminew.pdf>



- Azwar, & Mulyawan, andi wawan. (2017). Analisis Underground Economy Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak. *Jurnal Info Artha*, vol 1 no 1, 60–78. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3004254>
- Basuki, A. T. (2017). *Pengantar Ekonometrika*. Danisa Media.
- Creswell. (2014). *Research Design : qualitative, quantitative and mixec methods approaches*. SAGE Publications Inc.
- Furuoka, F., & Munir, Q. (2014). Unemployment and Inflation in Malaysia: Evidence from Error Correction Model. *Philippone Journal of Development*, 1(1), 35–45. https://www.ums.edu.my/mjbe/images/mjbe/vol1/article_3.pdf
- Herlina wa ode, et. al. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kambu Kota Kendari. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 3(1), 125–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52423/bujab.v3i1.9611>
- Kanao, Koji, H. dan, & Shigeyuki. (2010). The size of the underground economy in Japan. *Munich Personal RePec Archive*, 24064. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/21562/>
- Kiani, M., Ahmed, A., & Zaman, K. (2015). Combining qualitative and quantitative approaches for measuring underground economy of Pakistan. *Quality and Quantity*, 49(1), 295–317. <https://doi.org/10.1007/s11135-013-9987-1>
- Kristianto, A. H., Nadapdap, J. P., & Widya, P. R. (2021). The underground economic activity and the desire for corruption in the border region (study of Bengkayang District, West Kalimantan). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(4), 353–364. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i4.12871>
- Kristianto, A. H., Widya, P. R., & Nadapdap, J. P. (2021). The portrait of the underground economy and tax evasion: Descriptive analysis from border region. *Journal of Socioeconomics and Development*, 4(2), 156. <https://doi.org/10.31328/jsed.v4i2.2211>
- Mazhar, U., & Méon, P. G. (2017). Taxing the unobservable: The impact of the shadow economy on inflation and taxation. *World Development*, 90. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.08.019>
- Melnick, R., & Sokoler, M. (1984). The Government Revenue From Money Creation and The Inflationary Effects of a Decline in The Rate of Growth of GNP. *Journal of Monetary Economics*, 13.
- Nizar, M. A. (2015). Potensi penerimaan pajak dari underground economy di indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 15, 1–38. <https://doi.org/1410-3249>
- Nurunnabi, M. (2019). Political Influence and Tax Evasion in Bangladesh: What Went Wrong? *Emerald Publishing Limited*, 26, 113–134. <https://doi.org/10.1108/s1058-749720190000026007>
- Ouédraogo, I. M. (2017). Governance, Corruption, and the Informal Economy. *Modern Economy*, 08(02), 256–271. <https://doi.org/10.4236/me.2017.82018>
- Ozsahin, S., & Ucler, G. (2017). The consequences of corruption on inflation in developing countries: Evidence from panel cointegration and causality tests. *Economies*, 5(49). <https://doi.org/10.3390/economies5040049>
- Rahmani, T., & Yousefi, H. (2010). *Corruption, Monetary Policy, and Inflation: A Cross-Country Examination*.
- Samimi, A. J., & Abedini, M. (2012). Control of Corruption and Inflation Tax: New Evidence From Selected Developing Countries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 62, 441–445. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.072>
- Samuda, S. J. A. (2016). Underground Economy in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(1), 39–56. <https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599>



Aloysius Hari Kristianto, dkk. Dampak Aktifitas Ekonomi Bawah Tanah dan Korupsi Terhadap Tingkat Pendapatan, Tingkat Harga, dan Tingkat Suku Bunga di Indonesia (2010.Q1-2019.Q4).

Schneider, F., & Hametner, B. (2014). The shadow economy in Colombia: Size and effects on economic growth. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 20(2), 293–325. <https://doi.org/10.1515/peps-2013-0059>

Tan, Y. L., Habibullah, M. S., & Yiew, T. H. (2016). The Shadow economy in Malaysia: Evidence from an ARDL model. *International Journal of Economics and Management*, 10(2), 261–277.

Tanzi, V., & Fund, I. M. (2014). The Shadow Economy , Its Causes and Its Consequences. *International Seminar on the Shadow Economy Index in Brazil,* " Brazilian Institute of Ethics in Competition, July. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.581.4386&rep=rep1&type=pdf>

Williams, C. C., & Horodnic, I. A. (2017). Evaluating the relationship between social exclusion and participation in the informal sector in the European Union. *International Journal of Manpower*, 38(3), 489–503. <https://doi.org/10.1108/IJM-10-2015-0179>

Yakubu, M., Umar, U., & Bello, Z. A. (2014). Relationship between money supply and government revenues in Nigeria. *CBN Journal of Applied Statistics*, 5(2), 117–136.

